



BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Laporan ini memuat capaian kinerja atas sasaran strategis, realisasi indikator kinerja, analisis pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, serta berbagai kendala dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Selama tahun 2025, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya menjalankan peran strategisnya dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi pusat-daerah, promosi potensi daerah, serta pengelolaan Wisma NTB dan Anjungan NTB sebagai representasi daerah di Jakarta. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran pegawai serta dukungan para pemangku kepentingan.

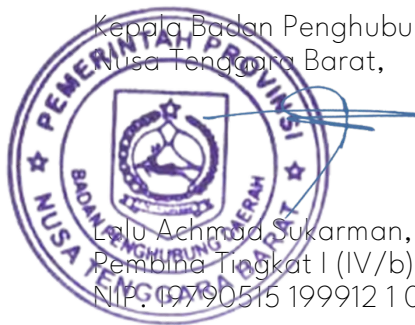
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan, baik dari sisi kualitas analisis, pemanfaatan data kinerja, maupun penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas dan kinerja organisasi di masa mendatang.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang transparan dan komprehensif mengenai kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Mataram,

2026

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat,



Lalu Achmad Sukarman, S.STP., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790515 199912 1 001

DAFTAR ISI

Uraian	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
1.5 Permasalahan Dan Isu Strategis	10
1.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (Inspektorat)	12
1.7 Sistematika Penulisan	14
Bab II Perencanaan Kinerja	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	15
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.4 Perjajian Kinerja	17
2.5 Dukungan Anggaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Realisasi Anggaran	28
Bab IV Penutup	31

DAFTAR TABEL

Uraian	Hal
Sasaran Strategis, Indikator Target dan Realisasi.	lv
Tabel 1.1. ASN Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.2. ASN Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.3. Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset pada Badan Penghubung Daerah	9
Tabel 1.4. Aset pada Badan Penghubung Daerah berdasarkan klasifikasi	9
Tabel 1.5. Identifikasi Permasalahan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	10
Tabel 1.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	12
Tabel 1.7. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2025	12
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Tahun 2024-2026	15
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	15
Tabel 2.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	17
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	17
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.6. Program/Kegiatan/Subkegiatan/Anggaran Mendukung Pencapaian Kinerja	18
Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025	20
Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Triwulan III Tahun 2025	21
Tabel 3.3. Realisasi Wisma NTB Tahun 2019-2025	22
Tabel 3.4. Jumlah tamu yang menginap pada Wisma NTB Tahun 2022-2025	22
Tabel 3.5. Realisasi Pelayanan Koordinasi Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2022-2025	22
Tabel 3.6. Jumlah Warga Terlantar asal NTB yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023-2025	23
Tabel 3.7. Jumlah Pengunjung Anjungan NTB Provinsi NTB Tahun 2020-2025	23
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2025	28

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan peran strategis Badan Penghubung.

Adapun capaian dan realisasi strategis badan penghubung Daerah Pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pada Badan Penghubung Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya peran strategis Badan Penghubung dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi, promosi daerah, dan kontribusi peningkatan PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB	Nilai Service Performance Index (SPI) Fasilitasi Pimpinan	N/A	95,75	96,03	100,3%
		Persentase kegiatan koordinasi pusat-daerah yang difasilitasi	N/A	95,75	93	97%
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi	N/A	95,75	100	104%
		Persentase keterisian kamar di Wisma NTB	N/A	8,5	8,7	102%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2025

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dalam upaya Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah memiliki tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan peran strategis Badan Penghubung. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa empat capaian indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur NTB Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi NTB tahun 2025-2029 telah telaksana dengan baik.

Pada tahun 2025, nilai SPI mencapai 96,03 dari target 95,75 (capaian 100,3%), Target tahun 2025 sebesar 95,75 dengan realisasi 96,03, sehingga tingkat capaian mencapai 100,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan fasilitasi pimpinan telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja pelayanan berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan efektivitas koordinasi serta dukungan administrasi yang optimal. Target sebesar 95,75% dengan realisasi 93%, sehingga capaian berada pada 97% dari target. Meskipun belum mencapai target penuh, realisasi ini tetap menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dan mendekati target. Perlu dilakukan evaluasi pada faktor penghambat agar seluruh kegiatan koordinasi yang direncanakan dapat terfasilitasi secara maksimal. Target sebesar 95,75% dengan realisasi 100%, menghasilkan capaian 104%. Keberhasilan ini didorong oleh eksistensi komunitas budaya NTB di Jakarta, pembentukan Diklat Kesenian dan Budaya sebagai ruang promosi berkelanjutan, serta perbaikan sarana prasarana Anjungan NTB yang meningkatkan daya tarik kegiatan. Tingkat keterisian kamar Wisma NTB mencapai 8,7% dari target 8,5% (capaian 102%), menunjukkan peningkatan pemanfaatan aset daerah yang berdampak pada potensi PAD. Keberhasilan ini didukung oleh pelayanan hospitality yang responsif, ramah, dan profesional serta peningkatan kualitas fasilitas penginapan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari penerapan SAKIP, yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja secara terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelaporan kinerja secara periodik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel merupakan harapan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan sistematis agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini disusun berdasarkan target dan indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026 serta selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Dengan demikian, LKjIP ini tidak hanya menggambarkan tingkat realisasi indikator kinerja utama dan sasaran perangkat daerah, tetapi juga menunjukkan kontribusi Badan Penghubung Daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (7-136/2025))
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 22)
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 33)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode pelaporan. LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Secara khusus, penyusunan LKjIP bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. Menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, melalui analisis capaian indikator kinerja serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat;
- c. Menjadi dasar tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya, baik yang berasal dari evaluasi internal maupun eksternal, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya dapat disempurnakan dan lebih berorientasi pada pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dengan demikian, LKjIP diharapkan mampu memperkuat budaya kinerja (performance culture) di lingkungan instansi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penghubung daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan, dimana badan penghubung memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1 Tugas Pokok

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat diantaranya :

1. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi, Pelayanan serta Tata Usaha.
2. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat NTB di Jakarta;
3. Menyusun bahan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintah daerah dan masyarakat NTB di Jakarta;
4. Menyusun bahan pelaksanaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga-lembaga negara, perwakilan-perwakilan negara, lembaga lembaga lainnya, dan masyarakat NTB di Jakarta;
5. Menyusun bahan pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di Jakarta;
6. Menyusun bahan pengelolaan Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah.
7. Menyusun bahan pengelolaan Wisma NTB di Jakarta;
8. Menyusun bahan fasilitasi promosi dan informasi NTB;
9. Menyusun bahan pelaksanaan ketatausahaan dalam tata kelola pemerintahan Badan Penghubung Daerah;

1.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Badan Penghubung Daerah mempunyai fungsi :

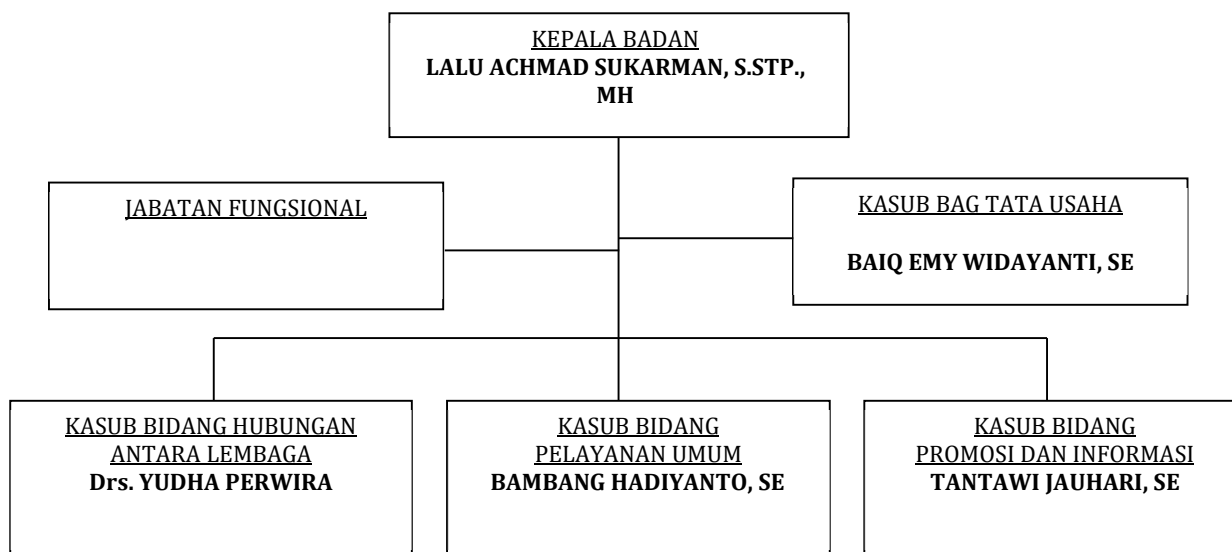
1. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Penghubung Daerah;
2. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
3. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penghubung Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan Antara lembaga, Sub Bidang Pelayanan Umum dan Sub Bidang Promosi dan Informasi, adapun Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provisi NTB

Tahun 2025



1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Tidak Tetap (PTT). Klasifikasi status pegawai tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan Perimbangan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat tenaga kontrak yang merupakan pegawai dengan pengangkatan secara swakelola oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dan hak keuangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diikat dengan kontrak kerja.

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2025 sebanyak 80 orang, terdiri dari 49 ASN, 6 PTT dan 27 tenaga kontrak. Jumlah pegawai menurut status dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	30
3	Golongan II	10
4	Golongan I	0
5	PPPK	5
6	PTT	5
7	Tenaga Kontrak	27
	Jumlah	80

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2025.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	Magister	3	-	-	3
2	Sarjana	21	-	3	24
3	D3	2	5	1	8
4	SLTA/SMK	17	-	22	39
5	SLTP	-	-	6	6
6	SD	-	-	-	-
	Jumlah	43	5	32	80

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2025.

Jumlah dan kualifikasi pegawai yang ada dirasa belum cukup berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk itu perlu adanya dukungan dan perhatian dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.

2. Sarana dan Prasarana

Badan Penghubung Daerah dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari aset tetap, aset lancar dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset pada Badan Penghubung Daerah

No.	Nama Barang	Nilai
A	ASET LANCAR	
1	Barang Persediaan	249.401.670,00
B	ASET TETAP	
1.	Tanah	86.500.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	10.957.432.830,00
3.	Gedung dan Bangunan	15.703.768.406,52
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.747.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	378.987.800,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.677.500,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(15.728.672.817,00)
C	ASET LAIN-LAIN	
1.	Aset tidak berwujud	29.022.500,00
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.856.768,00)
	Jumlah	11.884.008.121,52

Sumber : Neraca Badan Penghubung Daerah, 2024

Nilai aset yang dikelola oleh Badan Penghubung Daerah tersebut merupakan penunjang Program Pelayanan Penghubung yang terdiri dari beberapa klasifikasi aset yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Jumlah Aset pada Badan Penghubung Daerah berdasarkan klasifikasi

No.	Klasifikasi Aset	Jumlah
A	Bangunan	
	Wisma NTB	1 unit Bangunan
	Kamar Penginapan	26 Kamar
	Ruang Kerja	4 Ruang
	Ruang Pertemuan	1 Ruang
	Ruang Makan	1 Ruang
	Anjungan Daerah Prov. NTB	
	Loka Sasak	1 unit Bangunan
	Ruang Kerja	1 Ruang
	Ruang Pertemuan	1 Ruang
	Ruang Kesenian/Tari	1 Ruang
	Ruang Arsip	1 Ruang
	Istana Loka Samawa	1 unit Bangunan
	Ruang Pameran/Museum	2 Lantai
	Ruang Kerja	2 Ruang
	Ruang Pertemuan	1 Ruang

No.	Klasifikasi Aset	Jumlah
	Barak Kesenian	1 unit Bangunan
	Barak Penari	2 Ruang
	Panggung Pertunjukan	1 unit Bangunan
	Lumbung Padi	1 unit Bangunan
	Lumbung Padi	2 unit Bangunan
	Berugak	3 unit Bangunan
B	Kendaraan	
	Roda 4 (empat)	12 unit
	Roda 2 (dua)	14 unit
	Kendaraan Listrik (Mobil Golf)	1 unit
	Kendaraan Listrik Roda 2 (dua)	3 unit
C	Peralatan dan Perlengkapan Kesenian	
	Alat Musik Tradisional	7 set

Sumber : Neraca Badan Penghubung Daerah, 2024

Untuk menjalankan kegiatan pelayanan, penyebaran informasi dan promosi daerah sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk fungsi promosi dan informasi badan penghubung mengelola anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi budaya pariwisata NTB.

1.5 Permasalahan Dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan peran strategisnya mendukung pencapaian tujuan kelima pembangunan daerah, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian serta penanganan secara sistematis. Permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola pelayanan, serta efektivitas fungsi koordinasi dan fasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan penguatan kinerja organisasi agar kontribusi Badan Penghubung Daerah terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dapat semakin optimal.

Tabel 1.5 Identifikasi Permasalahan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB	<ol style="list-style-type: none"> Diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana serta kreatifitas Pelayanan Wisma NTB di Jakarta Penjelasan : Fasilitas yang tersedia di Wisma NTB sudah tidak memadai atau kurang menarik, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada tamu atau pejabat daerah yang datang. Belum sempurnanya Kualitas Standar Pelayanan Wisma NTB di Jakarta Penjelasan : Pelayanan yang diberikan masih belum sesuai standar kenyamanan, keramahan, maupun profesionalitas yang diharapkan oleh tamu atau pejabat. Terbatasnya pelaksanaan operasional Wisma NTB di lingkungan Menteng, Jakarta Pusat. Penjelasan : Pelaksanaan oprasional wisma NTB mengalami kendala akibat adanya pembatasan fungsi bangunan berdasarkan regulasi tata ruang yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya fasilitasi Pelayanan Penginapan Wisma NTB. Penjelasan : Penginapan belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti kamar yang layak, pelayanan staf, dan fasilitas penunjang lainnya. Belum optimalnya fasilitasi Pelayanan Mobilisasi Pejabat Tinggi Daerah. Penjelasan : Kurangnya dukungan transportasi atau sistem penjemputan/ pengantaran bagi pejabat tinggi daerah NTB yang datang ke Jakarta. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tidak memberikan izin terhadap pembangunan bangunan berupa wisma maupun hotel di wilayah Menteng, sehingga membatasi pemanfaatan lahan untuk operasional Wisma NTB. Penjelasan : Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tidak memperbolehkan pembangunan wisma maupun hotel, sehingga tidak memungkinkan pemanfaatan lahan untuk fungsi akomodasi di wilayah tersebut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fasilitasi hubungan antar lembaga-lembaga dan Pembinaan Masyarakat NTB Penjelasan : Minimnya sinergi dan komunikasi antara lembaga pemerintah, organisasi, dan komunitas masyarakat NTB. 2. Belum optimalnya penanganan Masyarakat NTB yang terlantar di Jabodetabek. Penjelasan : Masih ada masyarakat NTB yang kesulitan ekonomi atau sosial di wilayah Jabodetabek dan belum mendapatkan perhatian atau bantuan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhi kebutuhan Kebutuhan Layanan Protokol. Penjelasan : Belum adanya mekanisme atau personel protokol yang mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan antar lembaga secara sistematis dikarenakan minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan 2. Belum terpenuhi pelaksanaan koordinasi dan pelayanan masyarakat NTB yang terlantar di Jabodetabek Penjelasan : belum ada sistem atau lembaga yang secara khusus menangani dan mengawasi masalah sosial masyarakat NTB yang merantau ke Jabodetabek.
3	Belum optimalnya pelayanan promosi dan informasi Anjungan NTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya penerima informasi seni, budaya dan potensi Nusa Tenggara Barat melalui event promosi Penjelasan : Meski penerima informasi meningkat, namun penyampaiannya belum optimal, seperti dari sisi media promosi, konten, atau strategi penyebarannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi pariwisata dan potensi daerah serta pengelolaan Anjungan NTB TMII Penjelasan : Acara promosi kurang menarik, tidak rutin, atau tidak terorganisir dengan baik. Pengelolaan anjungan juga belum maksimal dalam menyampaikan potensi daerah. 2. Belum tersedianya penjelasan objek wisata anjungan NTB dan informasi destinasi Pariwisata NTB. Penjelasan : Tidak ada informasi yang cukup (seperti papan petunjuk, brosur, atau pemandu) tentang objek wisata di Anjungan NTB dan destinasi wisata di NTB secara keseluruhan.

Dari tabel tersebut Badan Penghubung Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki akar permasalahan yang cukup kompleks, adapun uraian dari penjelasan dalam tabel akar permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan daerah yang mewajibkan aparat sipil negara untuk menggunakan fasilitas Badan Penghubung Daerah apabila melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Dimana di dalam Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.
2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tidak memperbolehkan pembangunan wisma maupun hotel, sehingga tidak memungkinkan pemanfaatan lahan untuk fungsi akomodasi (hotel) di wilayah tersebut dalam upaya meningkatkan PAD Provinsi NTB.
3. Belum adanya kesadaran ASN bahwa dengan menggunakan fasilitas yang ada di Badan Penghubung Daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung dalam meningkatkan pelayanan yaitu dengan pengelolaan Wisma NTB berupa layanan kamar bagi tamu-tamu yang menginap di Wisma NTB, berikut ini kendala sarana dan prasarana pada Wisma NTB :
 - a. Banyak fasilitas Wisma NTB dalam kondisi tidak layak, seperti wallpaper yang mengelupas, pencahayaan kurang, dan kamar mandi rusak.
 - b. Upaya peremajaan dilakukan secara parsial karena keterbatasan anggaran.
 - c. Kondisi kamar yang kurang nyaman berdampak pada kepuasan dan potensi penurunan minat tamu untuk menginap.
 - d. Perbaikan hanya dilakukan pada item dengan urgensi tinggi (karpet, gorden, bed cover), belum menyentuh aspek mendasar (struktur, plumbing, interior total).
 - e. Belum terdapat fasilitas olah raga di dalam Wisma NTB yang menunjang pelayanan penginapan Wisma NTB.
4. Bangunan Anjungan NTB sudah tua dan tidak merepresentasikan budaya Nusa Tenggara Barat dan regulasi pengelolaan TMII.
5. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni pada PPID dan Keprotokolan.

Isu strategis Badan Penghubung Daerah diperoleh dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan melalui kertas kerja sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 yang dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Fasilitasi hubungan kerja dan tugas-tugas Koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan hubungan antar lembaga dengan lembaga negara, perwakilan negara, lembaga lainnya, dan masyarakat NTB;	Belum optimalnya fasilitasi hubungan antar lembaga-lembaga dan Pembinaan Masyarakat NTB	Pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam hubungan antar lembaga	Sistem komunikasi lintas institusi dan negara	Koordinasi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas nasional	Kanal komunikasi antara Pemprov NTB dengan kementerian/lembaga dan perwakilan daerah	Belum optimalnya pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat NTB di Jabodetabek;	Belum optimalnya penanganan Masyarakat NTB yang terlantar di Jabodetabek.	Pemberdayaan diaspora NTB dalam pembangunan sosial dan lingkungan daerah	Tren penguatan diaspora sebagai aset pembangunan daerah	Peningkatan perhatian pemerintah pada komunitas daerah di kota metropolitan	Kebutuhan wadah konsolidasi pembinaan sosial, dan ekonomi warga NTB perantauan	
Memberikan pelayanan kepada pejabat atau aparatur pemerintah provinsi atau anggota DPRD provinsi yang melaksanakan tugas dinas ke Jabodetabek;	Belum sempurnanya Kualitas Standar Pelayanan Wisma NTB di Jakarta	Fasilitasi kegiatan representasi daerah berbasis green practice	Penerapan best practice layanan perkantoran dan hospitality sektor publik	Penyesuaian standar pelayanan terhadap efisiensi anggaran.	Kualitas fasilitas Wisma NTB sebagai rumah representasi daerah	Belum optimalnya pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB
Pengelolaan Wisma NTB sebagai upaya meningkatkan PAD Provinsi NTB	Terbatasnya pelaksanaan operasional Wisma NTB di lingkungan Menteng, Jakarta Pusat.	Efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi dalam aktivitas representasi daerah	Optimalisasi aset pemerintah untuk revenue generating	Dorongan peningkatan PAD dan optimalisasi aset daerah	Potensi Wisma NTB sebagai pusat kegiatan dan layanan daerah	
Pengelolaan Anjungan Daerah NTB di TMII dan Wisma NTB di Jakarta	Diperlukannya revitalisasi sarana dan prasarana serta kreatifitas Pelayanan baik pada Anjungan Daerah NTB di TMII maupun pada Wisma NTB di Jakarta		Penguatan city branding dan promosi budaya berbasis pengalaman (experiential tourism).	Revitalisasi TMII sebagai etalase budaya daerah	Kebutuhan reposisi Anjungan NTB sebagai pusat promosi budaya dan investasi	
Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan penyampaian informasi potensi NTB;	Rendahnya penerima informasi seni, budaya dan potensi Nusa Tenggara Barat melalui event promosi	Peran penghubung dalam promosi investasi ramah lingkungan	Meningkatnya minat global terhadap pariwisata berkelanjutan	Sinergi pusat–daerah dalam event promosi nasional	Kebutuhan peningkatan intensitas event promosi di Jakarta	Belum optimalnya pelayanan promosi dan informasi Anjungan NTB

1.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (Inspektorat)

Berikut disampaikan rekomendasi LHE Tahun 2025 Inspektorat Provinsi NTB dan rencana aksi tindak lanjut :

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2025

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	KETERANGAN
A	PERENCANAAN KINERJA		
1	Pada pohon kinerja masih terdapat indikator sasaran kinerja yang belum memperhatikan hubungan sebab akibat atau level penjenjangan	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan hubungan sebab akibat atau level penjenjangan sehingga sasaran dan indikator level strategis diturunkan dengan selaras dan sesuai sampai pada level operasional	Dalam proses karena perubahan yang dinamis di tahun 2025 karena masih dalam masa penyusunan RPJMD dan sinkronisasi dengan PD
2	Pada pohon kinerja masih terdapat sasaran dan indikator yang belum SMART	Memperbaiki sasaran dan indikator pada pohon kinerja dan cascading agar lebih SMART	Dalam proses karena perubahan yang dinamis di tahun 2025 karena masih dalam masa penyusunan RPJMD dan sinkronisasi dengan PD

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	KETERANGAN
3	Terdapat sasaran kinerja level taktikal yang seharusnya masih berorientasi outcome namun pada pohon kinerja masih bersifat output	Memperbaiki pohon kinerja dan cascading pada sasaran kinerja level taktikal agar tujuan , sasaran, dan indikator kinerja selaras dengan pohon kinerja dan cascading	Dalam proses karena perubahan yang dinamis di tahun 2025 karena masih dalam masa penyusunan RPJMD dan sinkronisasi dengan PD
4	Pada dokumen perencanaan Renstra terdapat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang belum selaras dengan pohon kinerja dan cascading	Menyempurnakan pohon kinerja dan cascading agar memunculkan crosscutting atas kinerja yang dapat dicapai secara bersamaan dengan bidang/instansi lain. Selain itu juga menyempurnakan cascading agar mencantumkan informasi terkait nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan serta pejabat pengampu kinerja yang ingin dicapai	Sudah dilakukan dibuktikan dengan renstra, namun cascading akan berubah menyesuaikan Renstra 2025-2029
5	Terdapat ketidakselarasan indikator pada cascading dan PK eselon II dan III	Memperbaiki dokumen PK eselon III agar selaras dan sesuai dalam upaya mendukung tercapainya sasaran kinerja yang diampu oleh eselon II	Sudah dilakukan dibuktikan dengan cascading, namun akan berubah menyesuaikan Renstra 2025-2029
6	Pada pohon kinerja dan cascading belum memunculkan crosscutting atas kinerja yang dapat dicapai secara bersama dengan bidang/instansi lain. Selain itu juga belum mencantumkan informasi terkait nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, serta pejabat pengampu kinerja yang ingin dicapai	Memperbaiki pohon kinerja dan cascading sehingga muncul crosscutting dengan bidang/instansi lain dan mencantumkan program/kegiatan/sub kegiatan serta pejabat pengampu kinerja yang ingin dicapai	Sudah dilakukan dibuktikan dengan cascading, namun akan berubah menyesuaikan Renstra 2025-2029
7	Belum dapat diketahui apakah sasaran kinerja pada eselon II sudah didukung atau diturunkan dengan selaras dan sesuai sampai pada level terendah atau staf disebabkan sampai saat dibuatnya laporan tidak terdapat SKP yang diberikan pada masing masing bidang. Selain itu juga masih terdapat hal yang belum tepat pada sasaran kinerja eselon III yang seharusnya mendukung tercapainya sasaran kinerja eselon II namun justru sasaran yang diampu keduanya sama persis dan tidak memperhatikan level penjenjangan	Membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan memperhatikan keselarasannya dengan pohon kinerja dan cascading ataupun kesesuaiannya terhadap kinerja yang didukung di atasnya	Sudah dilakukan dibuktikan dengan matriks Kinerja, namun akan berubah menyesuaikan Renstra 2025-2029
B PENGUKURAN KINERJA			
	Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja berkala berupa pengukuran capaian rencana aksi triwulanan telah dilaksanakan namun belum dilengkapi laporan movev pencapaian target kinerja perangkat daerah per triwulan serta belum terdapat narasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemenuhan target yang ditetapkan. Selain itu juga sebaiknya memanfaatkan secara optimal aplikasi E SAKIP provinsi NTB dalam pengukuran dan monitoring kinerja secara elektronik	Melengkapi laporan monitoring terhadap capaian kinerja atas rencana aksi per triwulan serta melengkapi dengan permasalahan yang dialami dalam upaya mencapai target yang ditetapkan	Sudah dilakukan dalam Laporan Renja Triwulan
C PELAPORAN KINERJA			
	Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, pada Bab III Akuntabilitas Kinerja sub kegiatan perbandingan target dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, seharusnya membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, telah disajikan namun dalam table efisiensi anggaran tahun 2024 masih belum diisi dan narasi sebagian belum disesuaikan dengan ketentuan permenpan 53 tahun 2014	Memperbaiki laporan kinerja dengan mempedomani ketentuan permenpan 53 tahun 2014	Sudah dilakukan perbaikan dengan mempedomani ketentuan permenpan 53 tahun 2014
D EVALUASI INTERNAL			
1	RATL belum disertai bukti nyata dalam perbaikan kinerja serta masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas	Hasil evaluasi AKP dan APIP agar ditindak lanjuti dalam langkah - langkah yang nyata untuk perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Sudah dilakukan dengan monitoring dilakukan dengan penilaian E-Kinerja dan pemenuhan bukti dukung
2	Masih perlunya peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas dimana masih ditemukan temuan dalam evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dan pohon kinerja hasil pendampingan oleh APIP masih perlu dilakukan perbaikan secara optima	Menyusun rencana aksi tindak lanjut (RATL) dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi AKIP dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan serta inspektorat sebagai bagian dari perbaikan internal berkelanjutan	Sudah dilakukan dengan monitoring dilakukan dengan penilaian E-Kinerja dan pemenuhan bukti dukung

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi;
2. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.2 Realisasi Anggaran pada sub bab ini disajikan capaian realisasi anggaran organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPD Tahun 2024–2026 tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024–2026. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat dan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, maka arah kebijakan pembangunan daerah mengalami penyesuaian sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD Tahun 2025–2029 tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, guna memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sasaran kinerja yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Visi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan maupun organisasi sehingga visi itu penting untuk dituangkan dalam setiap perencanaan. Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka mencapai visi yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai mengetahui arah kebijakan instansi dan mengetahui alasan keberadaan serta peranannya dalam mewujudkan visi tersebut.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB disajikan berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, sebagaimana berikut.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan
	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan peran strategis Badan Penghubung	Meningkatnya peran strategis Badan Penghubung dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi, promosi daerah, dan kontribusi peningkatan PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB	Nilai Service Performance Index (SPI) Fasilitasi Pimpinan
		Persentase kegiatan koordinasi pusat-daerah yang difasilitasi
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi
		Persentase keterisian kamar di Wisma NTB

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Langkah strategis Badan Penghubung Daerah selaras dengan Strategi pada RPJMD yaitu sebagaimana strategi yang tertuang pada RPJMD yaitu *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional dan Berintegritas* dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan peran strategis Badan Penghubung dengan arah kebijakan RPJMD *Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat* yang dalam arah kebijakan renstra meliputi:

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Wisma NTB dan Anjungan TMII:
 - o Menjawab akar masalah pelayanan fisik seperti kondisi kamar, pencahayaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - o Peningkatan ini juga sejalan dengan tuntutan representasi budaya dan kelestarian lingkungan (green practice) sesuai kebijakan pengelola TMII.
2. Transformasi Strategis Wisma NTB untuk Optimalisasi PAD Provinsi NTB
 - o Menyusun strategi relokasi Wisma NTB ke lokasi yang secara tata ruang memungkinkan pembangunan fasilitas penginapan dan memiliki potensi ekonomi yang lebih tinggi.
 - o Merancang model pengembangan akomodasi terpadu (perhotelan dan kantor penghubung dalam satu kawasan/flat) yang efisien dan mendukung layanan prima bagi pejabat serta masyarakat NTB di Jakarta.
 - o Mengkaji opsi pembelian, pemanfaatan bersama, atau kerja sama operasional dengan aset hotel existing yang legal dan strategis, guna mempercepat realisasi pemanfaatan dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Standarisasi dan Profesionalisasi Layanan:
 - o Meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan staf dan pengembangan SOP berbasis pelayanan prima (hospitality).
 - o Penataan layanan penginapan dan protokol agar sesuai dengan ekspektasi pejabat dan tamu daerah.
4. Penguatan Fungsi Koordinatif dan Jejaring Kelembagaan:
 - o Membangun sistem komunikasi dan kolaborasi digital antarlembaga dan komunitas masyarakat NTB di Jabodetabek.
 - o Menyusun mekanisme bantuan sosial bagi masyarakat NTB yang terlantar dan membutuhkan pendampingan.
 - o Mengembangkan skema koordinatif lintas instansi (dengan BAPPEDA, Dinsos, BP2MI, dan Disnaker) untuk penanganan dan pemulangan warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terdampak konflik sosial, perang, atau situasi darurat kemanusiaan, termasuk warga yang terlantar akibat penipuan pekerjaan.
5. Peningkatan Efektivitas Promosi Daerah:
 - o Modernisasi media promosi digital dan desain ulang konten pariwisata, seni budaya, dan potensi ekonomi.
 - o Menjadikan Anjungan TMII sebagai pusat informasi dan etalase strategis NTB melalui kemitraan komunitas dan kurator budaya.
6. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya dan Inovasi Digital:
 - o Penguatan PPID, pengembangan sistem informasi layanan publik, serta efisiensi anggaran melalui strategi pengadaan terencana dan berbasis prioritas.

Meningkatkan kesadaran ASN untuk menggunakan fasilitas Badan Penghubung dengan mendorong regulasi pemerintah daerah sebagai bagian dari kontribusi terhadap PAD.

Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta menjadi turunan langsung yang diterjemahkan perangkat daerah dari Agenda Kerja Prioritas Program Unggulan NTB *Good and Smart Governance* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Arah kebijakan ini dirancang untuk menjawab isu strategis, mengatasi akar permasalahan pelayanan, dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Mendorong pemerintahan yang bersih dari KKN melalui pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya, optimalisasi pendapatan daerah, serta penciptaan sumber pembiayaan pembangunan alternatif secara tertib hukum.	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Tamu dan Koordinasi Pemerintahan	Agenda prioritas kerja 2. Fiskal Kuat, bertujuan untuk meningkatkan PAD sesuai potensi daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan belanja daerah yang dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah
2			Transformasi Strategis Wisma NTB untuk Optimalisasi PAD Provinsi NTB	
3			Optimalisasi Fungsi Koordinatif Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat NTB	
4	Mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik melalui koordinasi yang efektif, transparan, dan akuntabel antara daerah dan pusat. Hal ini memperkuat meritokrasi birokrasi, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas wilayah.		Revitalisasi Sarana Promosi dan Representasi Daerah di Pusat Pemerintahan	Agenda prioritas kerja 6. Pelayanan publik prima bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan publik perangkat daerah, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, yang dijabarkan secara sistematis melalui mekanisme cascading hingga ke level unit kerja dan individu pegawai sesuai amanat RPD Provinsi NTB Tahun 2024–2026. Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 selanjutnya mengacu pada Renstra Badan Penghubung Daerah Tahun 2025–2029 agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah periode lima tahunan terbaru.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024–2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan tamu wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	96%
2	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	96%
3	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	96%

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
1	Meningkatnya peran strategis Badan Penghubung dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi, promosi daerah, dan peningkatan PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB	Nilai Service Performance Index (SPI) Fasilitasi Pimpinan	95,75
		Persentase kegiatan koordinasi pusat-daerah yang difasilitasi	95,75
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi	95,75
		Persentase keterisian kamar di Wisma NTB	8,5

2.5 Dukungan Anggaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh alokasi anggaran yang disusun berbasis kinerja dan diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terintegrasi, khususnya dalam pelayanan penghubung, fasilitasi pimpinan dan koordinasi pusat-daerah, promosi potensi daerah, serta pengelolaan Wisma dan Anjungan NTB, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya.

Tabel 2.6 Program/Kegiatan/Subkegiatan/Anggaran Mendukung Pencapaian Kinerja

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.736.264.600	1.403.821.000
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.736.264.600	1.403.821.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.244.981.400	899.979.600
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	5.243.500	115.274.700
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	486.039.700	388.566.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.100.722.549	17.414.285.603
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.086.000	47.479.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.469.000	5.469.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.159.000	5.159.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.973.000	4.973.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.089.000	2.089.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.348.000	15.743.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.089.000	2.556.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.959.000	11.489.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.997.500.811	7.592.663.225
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.013.000	2.013.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.020.611	1.921.611
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.984.000	1.006.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.353.000	29.334.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.961.130.200	7.558.388.614
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.523.310	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.523.310	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.064.000	20.188.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.064.000	20.188.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.320.031.300	1.911.877.090
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.950.000.000	465.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.200.000	16.200.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	287.345.900	209.860.170
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.747.000	25.210.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.617.000	80.741.500

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	493.545.050	636.364.470
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.576.350	478.500.950
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.450.000	3.096.815.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.450.000	3.096.815.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.657.519.128	3.497.569.088
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	751.981.600	536.584.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.795.837.528	2.819.885.088
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.700.000	103.600.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.000.000	37.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830.548.000	1.247.694.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	12.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	444.438.000	605.844.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.010.000	14.810.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.100.000	615.040.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan ketaatan atas peraturan pemerintahan tentang pelaporan untuk memberikan transparansi dalam penggunaan keuangan negara yang baik dan bersih. Profesionalitas aparatur pengelolaan keuangan akan menjadi semangat kerja yang dinamis untuk menumbuhkan karya dan karsa dalam sektor riil kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menjadi keseimbangan antara perencanaan dan pencapaian, perumusan dan pencapaian. Sinkronisasi antara laporan akuntabilitas kinerja dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Dengan adanya laporan kinerja setiap tahunnya dapat menggambarkan trend yang dihadapi oleh setiap OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis serta permasalahan yang dihadapi. ketersediaan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dalam rangka perbaikan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

3.1.1. Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Badan Penghubung Daerah berperan dalam memperkuat koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah daerah dan pusat. Sasaran strategisnya mencakup peningkatan layanan keprotokolan, diplomasi daerah, serta optimalisasi penyediaan fasilitas bagi pemangku kepentingan. Melalui upaya ini, Badan Penghubung Daerah berkomitmen untuk mendukung promosi potensi daerah dan memastikan kepentingan daerah terakomodasi dalam kebijakan nasional. Berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 terdapat 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama yang akan diakuntabilitaskan capaiannya, yaitu :

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN 2025
Meningkatnya Kualitas pelayanan tamu wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	96%	95,94%	99,94%
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	96%	96,17%	100,17%
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	96%	96,48%	100,50%

3.1.2. Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 diukur berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, yang memuat 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Penetapan dan penyesuaian indikator tersebut telah melalui proses diskusi dan pembahasan secara komprehensif dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, sehingga selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja (performance plan) dengan realisasi capaian (performance result) sampai akhir Triwulan IV.

Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN 2025
Meningkatnya peran strategis Badan Penghubung dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi, promosi daerah, dan peningkatan PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB	Nilai Service Performance Index (SPI) Fasilitasi Pimpinan	95,75	96,03	100,3%
	Persentase kegiatan koordinasi pusat-daerah yang difasilitasi	95,75	93	97%
	Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi	95,75	100	104%
	Persentase keterisian kamar di Wisma NTB	8,5	8,7	102%

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Periode sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2022–2025 pada tabel lampiran, secara umum indikator tingkat kepuasan pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat. Pada Triwulan III Tahun 2025, seluruh indikator telah mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah.

Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
		Targ et	Kine rja	Capaia n	Target	Targ et	Targ et	Targ et	Kinerj a	Capaian	Target	Kinerj a	Capaian
Sasaran 1 :	Indikator Sasaran 1:												
Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	85%	85%	100%	100%	95%	95%	95%	95,23%	100,24%	96%	95,94%	99,94%
Sasaran 2 :	Indikator Sasaran 2:												
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	-	-	-	-	-	-	95%	95,25%	100,26%	96%	96,17%	100,17%
Sasaran 3 :	Indikator Sasaran 3:												
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	85%	85%	100%	100%	95%	95%	95%	95,25%	100,26%	96%	96,48%	100,50%

1. Sasaran 1 – Pelayanan Wisma NTB dan Fasilitas Pimpinan

Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2022 tercapai 100%, tahun 2023 sebesar 95%, dan tahun 2024 sebesar 100,24%. Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi mencapai 95,94% dari target 96% atau 99,94% tingkat capaian.

Tabel 3.3.
Realisasi Wisma NTB Tahun 2019-2025

No	Tahun	Retribusi Sewa Kamar Wisma NTB		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2019	1.500.000.000	1.347.300.000	90%
2	2020	1.500.000.000	241.630.000	16%
3	2021	1.542.800.000	90.260.000	6%
4	2022	1.421.145.000	136.500.000	10%
5	2023	140.000.000	154.260.000	110%
6	2024	144.700.000	164.380.000	114%
7	2025	144.700.000	164.410.000	114%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2025

Tabel 3.4
Jumlah tamu yang menginap pada Wisma NTB Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	95	149	162	198
Perempuan	37	73	119	102
Jumlah	132	222	281	300

Stabilitas capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Wisma NTB tetap terjaga. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh:

- Optimalisasi pelayanan pimpinan melalui sistem koordinasi protokoler yang lebih tertata dan responsif.
- Peningkatan kualitas hospitality, termasuk keramahan petugas, kecepatan layanan, dan penataan ulang standar pelayanan kamar.
- Perbaikan fasilitas secara bertahap (penataan kamar, kebersihan, peremajaan sarana pendukung).
- Peningkatan pelayanan mobilisasi pimpinan dan tamu daerah yang lebih terjadwal dan terkoordinasi dengan baik.

Meskipun capaian Triwulan III 2025 sedikit di bawah capaian penuh tahun 2024, secara tren menunjukkan konsistensi kualitas layanan dan berpotensi melampaui target pada akhir tahun anggaran.

2. Sasaran 2 – Pelayanan Kelembagaan dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga

Indikator kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan mulai terukur secara konsisten sejak tahun 2024 dengan capaian 100,26%. Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi mencapai 96,17% dari target 96% atau 100,17% tingkat capaian.

Tabel 3.5. Realisasi Pelayanan Koordinasi Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2022-2025

Indikator Bidang Urusan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Layanan Fasilitas Dan Koordinasi Tugas Kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Di Jakarta Dan Sekitarnya	175	216	175	221	175	190	80	74

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

Tabel 3.6. Jumlah Warga Terlantar asal NTB yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023-2024

Tahun	2022	2023	2024	2025
Jumlah Warga Asal NTB	10 Warga	1 Warga	22 Warga	15 Warga

Capaian ini menunjukkan keberhasilan penguatan fungsi kelembagaan Badan Penghubung Daerah, yang antara lain ditunjang oleh:

- Keberhasilan pelayanan protokol dan fasilitasi kegiatan pimpinan daerah di tingkat pusat yang berjalan tertib dan profesional.
- Pelaksanaan pemulangan warga NTB terlantar di wilayah Jabodetabek secara terkoordinasi dengan instansi terkait, yang menunjukkan fungsi pelayanan sosial kemasyarakatan berjalan efektif.
- Peningkatan intensitas pertemuan dan penguatan jejaring diaspora NTB di Jakarta tahun 2025 sebagai bagian dari strategi kolaborasi pembangunan daerah.
- Penguatan komunikasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung agenda daerah.

Secara keseluruhan, fungsi kelembagaan pada tahun 2025 menunjukkan penguatan kualitas layanan yang lebih sistematis dibanding periode sebelumnya.

3. Sasaran 3 – Pelayanan Promosi dan Informasi di Anjungan NTB TMII

Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan Anjungan NTB di TMII pada tahun 2022 mencapai 100%, tahun 2023 sebesar 95%, dan tahun 2024 sebesar 100,26%. Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian mencapai 96,48% dari target 96% atau 100,50%.

Sebagaimana dijelaskan dalam LKJIP Tahun 2024, capaian kepuasan sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, antara lain dampak Pandemi Covid-19, kebijakan PPKM, serta revitalisasi kawasan TMII pada tahun 2020–2022. Selain itu, perubahan pengelola dari Yayasan Harapan Kita ke Pemerintah melalui Kemensetneg RI dan selanjutnya ke BUMN PT Taman Wisata Candi bersama PT Bhumi Visatanda turut membawa kebijakan baru seperti pembatasan kendaraan emisi dan penyesuaian akses masuk berbayar, yang sempat memengaruhi angka kunjungan.

Tabel 3.7 Jumlah Pengunjung Anjungan NTB Provinsi NTB Tahun 2020-2025

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
➤ Wisatawan Mancanegara	Orang	167	27	88	512	532	428
➤ Wisatawan Nusantara	Orang	15.162	4.607	15.989	40.138	35.061	22.792
➤ Pelajar/Mahasiswa	Orang	1.322	193	1.025	7.847	8.337	13.470
JUMLAH		49.352	16.651	17.102	48.497	43.930	36.690

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2025

Pada tahun 2025, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan, antara lain:

- Peremajaan sarana dan prasarana Anjungan NTB (penataan berugak, panggung, dan perbaikan estetika bangunan).
- Penguatan kegiatan seni dan budaya melalui pembentukan Diklat Kesenian dan Budaya NTB di Anjungan.
- Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan pemanduan pengunjung.
- Adaptasi terhadap kebijakan pengelola TMII dengan penyesuaian pola pelayanan dan promosi digital.

Langkah-langkah tersebut berkontribusi pada stabilnya tingkat kepuasan pengunjung hingga Triwulan III Tahun 2025, sekaligus menunjukkan pemulihan dan penguatan citra Anjungan NTB sebagai etalase budaya daerah.

Kesimpulan Analisis Perbandingan

Secara umum, dibandingkan periode sebelumnya, capaian kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan:

- Konsistensi tingkat kepuasan di atas 95% pada seluruh indikator strategis.
- Stabilitas pelayanan meskipun terdapat dinamika regulasi dan faktor eksternal.
- Penguatan kualitas pelayanan berbasis hospitality, koordinasi kelembagaan, dan promosi budaya.
- Perbaikan sistem pelayanan dan penguatan jejaring kolaborasi pusat–daerah.

Dengan tren capaian yang positif dan stabil tersebut, Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB optimis bahwa target kinerja Tahun 2025 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada akhir periode pelaporan, dengan tetap berfokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan peran strategis, dan optimalisasi kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perbandingan capaian kinerja pada akhir periode tahun 2025 dengan periode sebelumnya belum dapat dilakukan secara kuantitatif dan komprehensif, mengingat sebagian indikator kinerja yang digunakan pada tahun pelaporan ini merupakan indikator baru yang ditetapkan seiring dengan penyesuaian dokumen perencanaan strategis dan Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029. Pada periode sebelumnya, indikator kinerja yang digunakan memiliki rumusan, satuan, maupun fokus pengukuran yang berbeda, sehingga tidak sepenuhnya sebanding secara langsung (apple to apple) dengan indikator yang digunakan pada tahun berjalan.

Meskipun demikian, secara kualitatif dapat disampaikan bahwa terdapat kesinambungan arah kebijakan dan substansi kinerja, khususnya dalam penguatan peran fasilitasi pimpinan, koordinasi pusat–daerah, promosi potensi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan Wisma NTB. Penetapan indikator baru pada Tahun 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan ketajaman pengukuran kinerja, memperjelas hubungan antara output dan outcome, serta mendukung penguatan implementasi SAKIP yang lebih terukur dan berorientasi hasil.

Ke depan, indikator yang telah ditetapkan pada periode Renstra 2025–2029 akan menjadi dasar pembentukan data deret waktu (time series) sehingga memungkinkan dilakukannya analisis tren kinerja secara lebih akurat pada tahun-tahun berikutnya, baik dalam melihat pola peningkatan, stabilitas, maupun potensi penurunan kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

3.1.4. Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM)

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas suatu organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya, baik finansial, manusia, maupun material, dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jumlah 80 pegawai Badan Penghubung Daerah dioptimalkan dalam pembagian tugas yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha 20 orang, Sub Bidang Pelayanan Umum 30 orang, Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga 8 orang dan Sub Bidang Promosi dan Informasi 21 orang. Jumlah pegawai tersebut telah ditetapkan pada analisa jabatan dan beban kerja sehingga mengoptimalkan kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB

3.1.5. Pengaruh Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung utama yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah. Oleh karena itu, kondisi, ketersediaan, dan kualitas sarana prasarana perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan fungsi koordinasi. Perbaikan sarana dan prasarana dibagi menjadi 2 lokus yaitu Wisma NTB dan Anjungan Daerah NTB di TMII

Perbaikan sarana dan prasarana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Pada Wisma NTB, peningkatan dilakukan untuk menghadirkan suasana yang lebih representatif dan nyaman bagi tamu yang menginap, melalui pembenahan fasilitas seperti penggantian dan perawatan AC kamar, AC lobi, serta ruang makan lantai II, pembaruan wallpaper dan karpet, pengecatan ruangan, penataan taman, serta berbagai perbaikan lainnya sesuai prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sementara itu, di Anjungan Daerah NTB di TMII, perbaikan meliputi pengecatan atap Museum Loka Samawa dan bangunan serbaguna, perbaikan atap lumbung pada latar panggung pentas, peremajaan tiga unit sakepat beserta pengecatan enam unit sakepat, serta penataan ulang lanskap melalui penggantian batu alam yang telah rusak dengan paving block yang lebih rapi dan tertata.

3.1.6. Analisa Capaian Kinerja

a. Analisis Capaian

Berdasarkan tabel capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan seluruh indikator telah mencapai bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, realisasi tingkat kepuasan sebesar 95,94% dari target 96% menghasilkan capaian 99,94% yang menunjukkan kualitas pelayanan tetap berada pada kategori sangat memuaskan. Sementara itu, peningkatan kualitas koordinasi hubungan antar lembaga di Jabodetabek mencatat realisasi 96,17% dengan tingkat capaian 100,17%, serta peningkatan kualitas promosi dan informasi seni budaya pada Anjungan NTB di TMII mencapai realisasi 96,48% dengan capaian 100,50%. Capaian hingga Triwulan III ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan efektif dan konsisten, serta memberikan optimisme terhadap ketercapaian target kinerja secara penuh pada akhir Tahun 2025.

Pada tahun 2025, nilai SPI mencapai 96,03 dari target 95,75 (capaian 100,3%), Target tahun 2025 sebesar 95,75 dengan realisasi 96,03, sehingga tingkat capaian mencapai 100,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan fasilitasi pimpinan telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja pelayanan berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan efektivitas koordinasi serta dukungan administrasi yang optimal. Target sebesar 95,75% dengan realisasi 93%, sehingga capaian berada pada 97% dari target. Meskipun belum mencapai target penuh, realisasi ini tetap menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dan mendekati target. Perlu dilakukan evaluasi pada faktor penghambat agar seluruh kegiatan koordinasi yang direncanakan dapat terfasilitasi secara maksimal. Target sebesar 95,75% dengan realisasi 100%, menghasilkan capaian 104%. Keberhasilan ini didorong oleh eksistensi komunitas budaya NTB di Jakarta, pembentukan Diklat Kesenian dan Budaya sebagai ruang promosi berkelanjutan, serta perbaikan sarana prasarana Anjungan NTB yang meningkatkan daya tarik kegiatan. Tingkat keterisian kamar Wisma NTB mencapai 8,7% dari target 8,5% (capaian 102%), menunjukkan peningkatan pemanfaatan aset daerah yang berdampak pada potensi PAD. Keberhasilan ini didukung oleh pelayanan hospitality yang responsif, ramah, dan profesional serta peningkatan kualitas fasilitas penginapan.

b. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan alternative yang telah dilakukan

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian target, baik yang bersumber dari aspek internal seperti perencanaan, SDM, dan tata kelola, maupun faktor eksternal. Pembahasan ini juga memuat langkah-langkah dan alternatif perbaikan yang telah dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan akuntabel.

- **Faktor Penyebab Keberhasilan :**

- Upaya perbaikan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Peningkatan fasilitas Wisma NTB menghadirkan suasana yang lebih representatif dan nyaman bagi tamu, melalui pembenahan AC kamar dan lobi, ruang makan lantai II, pembaruan wallpaper dan karpet, pengecatan ruangan, penataan taman, serta berbagai perbaikan lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kenyamanan optimal bagi tamu yang menginap maupun berkunjung.
- Tingginya semangat dan partisipasi masyarakat diaspora Nusa Tenggara Barat dalam kegiatan pertemuan dan pembinaan. Antusiasme ini tercermin dari tingkat kehadiran yang konsisten, keterlibatan aktif dalam diskusi, serta dukungan terhadap agenda yang dilaksanakan. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi dan fasilitasi kelembagaan, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
- Perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan secara bertahap. Pembenahan meliputi pengecatan atap Museum Loka Samawa dan bangunan serbaguna, perbaikan atap lumbung pada latar panggung pentas, peremajaan tiga unit sakepat beserta pengecatan enam unit sakepat, serta penataan ulang lanskap melalui penggantian batu alam yang rusak dengan paving block yang lebih rapi dan tertata. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat citra representasi budaya NTB di tingkat nasional.

- **Faktor Penyebab Kegagalan :**

- Belum adanya peraturan daerah yang mewajibkan aparat sipil negara untuk menggunakan fasilitas Badan Penghubung Daerah apabila melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Dimana di dalam Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta. Adapun evaluasi dari upaya penerapan Pergub ini kembali lagi ke fasilitas yang diberikan Wisma NTB belum mendekati Hotel bintang 3 sehingga upaya revisi Pergub masih perlu dikaji secara berkala sesuai peningkatan sarana dan prasarana Wisma NTB.
- Kondisi Anjungan NTB di TMII yang memprihatinkan dengan bangunan tua yang tidak sesuai regulasi pengelola TMII dan fasilitas yang belum memadai. Selain itu, regulasi TMII mengharuskan setiap Anjungan memenuhi standar tradisi lokal dan mendukung program zero emission, menambah kompleksitas tantangan.
- Dari sisi pelayanan masyarakat terlantar sejauh ini dilaksanakan tanpa ada anggaran yang teralokasi khusus. Selain itu keterbatasan anggaran di APBD Murni belum bisa mewujudkan pertemuan Diaspora yang diselenggarakan langsung Badan Penghubung Daerah

- **Solusi yang dilakukan untuk mencapai kinerja :**

- Mendorong usulan perubahan Pergub tentang perjalanan dinas, agar dapat meningkatkan okupansi produktif dalam pemanfaatan Wisma NTB sebagai aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD

- Melakukan Koordinasi intensif terkait tugas dan kewenangan dalam proses pemulangan warga NTB terlantar dengan Instansi-instansi terkait. Melakukan penganggaran pada APBD Perubahan untuk pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan diaspora dalam rangka menyambut HUT NTB memberikan euphoria masyarakat NTB di Jakarta dalam mencintai tanah asal/kelahiran.
- Kreatifitas dan inovasi pelayanan Badan Penghubung NTB di Jakarta. Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi pelayanannya. Salah satu langkah yang diambil adalah Pembentukan Diklat Kesenian dan Budaya Nusa Tenggara Barat di Anjungan NTB. Selain itu perbaikan sarana dan prasarana juga ditingkatkan mulai dari perbaikan berugak, panggung serta peremajaan warna atap genteng juga dilaksanakan di tahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, setiap anggaran atau keuangan yang dikeluarkan harus memiliki nilai kinerja, untuk itu program kegiatan yang dilaksanakan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					18.818.106.603		16.469.314.836		88%
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terpenuhinya Peningkatan PAD Wisma NTB sesuai target pertumbuhan tahunan.	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	Persentase	3% (169.311.400)	1.403.821.000	0,02% (164.410.000)	1.297.975.003	97%	92%
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	12	1.403.821.000	12	1.297.975.003	100%	92%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan Wisma NTB di Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	12	899.979.600	12	800.350.803	100%	89%
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya pelaksanaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga-lembaga, Kementerian dan perwakilan-perwakilan negara dengan Perangkat Daerah, Daerah Tingkat II dan Pembinaan Masyarakat NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	12	115.274.700	12	109.149.700	100%	95%
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatnya Kualitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	12	388.566.700	12	388.474.500	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	Persentase	96	17.414.285.603	96,04	15.171.339.833	100%	87%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	47.479.200	1	42.223.400	100%	89%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5.469.000	2	1.469.000	100%	27%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.159.000	1	5.129.000	100%	99%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.973.000	1	4.973.000	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.089.000	1	2.089.000	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	2	15.743.400	2	15.184.400	100%	96%

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.556.800	1	1.890.000	100%	74%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis serta Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	11.489.000	2	11.489.000	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi Penatausahaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	7.592.663.225	47	5.889.685.252	104%	78%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.013.000	1	2.013.000	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.921.611	1	1.921.511	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Triwulan dan Tahunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	1.006.000	4	1.006.000	100%	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	29.334.000	12	28.529.000	100%	97%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	7.558.388.614	47	5.856.215.741	104%	77%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase	100	20.188.000	100	20.188.000	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20.188.000	1	20.188.000	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Umum yang diselesaikan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum yang diselesaikan	Persentase	100	1.911.877.090	100	1.769.566.357	100%	93%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	465.000.000	12	424.940.000	100%	91%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Dokumen, Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	16.200.000	4	11.700.000	100%	72%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	209.860.170	50	196.976.670	100%	94%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25.210.000	2	25.210.000	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	80.741.500	7	80.740.050	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	636.364.470	1	551.567.770	100%	87%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	478.500.950	101	478.431.867	168%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	3.096.815.000	100	3.081.140.500	100%	99%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	3.096.815.000	6	3.081.140.500	100%	99%
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	3.497.569.088	100	3.267.913.103	100%	93%

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	536.584.000	12	495.865.789	100%	92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.819.885.088	12	2.661.403.814	100%	94%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	103.600.000	1	101.475.000	100%	98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Dokumen dan Barang dari Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	37.500.000	1	9.168.500	100%	24%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	1.247.694.000	100	1.100.623.221	100%	88%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	605.844.000	2	563.749.671	100%	93%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.810.000	1	14.097.000	100%	95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	615.040.000	24	510.776.550	100%	83%

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja pada Bab III, secara umum Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dan relatif optimal dalam mendukung sasaran strategis perangkat daerah.

Pada sasaran strategis "*Meningkatnya peran strategis Badan Penghubung dalam fasilitasi pimpinan, koordinasi, promosi daerah, dan peningkatan PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB*", sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang melampaui atau mendekati target yang ditetapkan. Nilai Service Performance Index (SPI) Fasilitasi Pimpinan terealisasi sebesar 96,03 atau 100,3% dari target, yang menunjukkan kualitas pelayanan fasilitasi pimpinan berada pada kategori sangat baik. Persentase promosi daerah yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi juga mencapai 104% dari target, mencerminkan meningkatnya intensitas promosi dan eksposur potensi daerah di tingkat pusat.

Persentase keterisian kamar Wisma NTB terealisasi sebesar 8,7% dari target 8,5% (102%), yang menunjukkan adanya tren peningkatan pemanfaatan fasilitas penginapan. Namun demikian, capaian Persentase kegiatan koordinasi pusat–daerah yang difasilitasi sebesar 97% masih memerlukan penguatan dari sisi perencanaan dan optimalisasi jejaring koordinasi agar lebih responsif dan terintegrasi. Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran mencapai sekitar 88% dari total pagu, yang mencerminkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya meskipun tetap perlu peningkatan dalam perencanaan dan percepatan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran lebih optimal tanpa mengurangi kualitas output dan outcome program. Analisis efisiensi sumber daya menunjukkan bahwa dukungan 80 pegawai yang terdistribusi pada masing-masing sub bagian dan sub bidang telah cukup mendukung pencapaian kinerja, meskipun peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas dan pelayanan tetap menjadi kebutuhan prioritas.

Pada aspek pengelolaan sarana dan prasarana, dukungan aset berupa Wisma NTB dan Anjungan NTB di TMII menjadi faktor penting dalam menunjang capaian kinerja. Perbaikan fasilitas, peningkatan kreativitas pelayanan, serta penguatan fungsi promosi budaya melalui kegiatan kesenian menjadi nilai tambah dalam meningkatkan citra dan representasi daerah. Namun demikian, keterbatasan regulasi tata ruang dan kebutuhan penyusunan masterplan Anjungan NTB menjadi isu strategis yang harus ditindaklanjuti secara kolaboratif dengan perangkat daerah terkait.

Evaluasi internal atas implementasi SAKIP menunjukkan adanya perbaikan pada aspek cascading kinerja, penyusunan SKP yang lebih selaras dengan pohon kinerja, serta pemanfaatan aplikasi E-Kinerja. Meskipun demikian, peningkatan kualitas analisis kinerja berbasis data time series, penyempurnaan pelaporan efisiensi anggaran, serta penguatan tindak lanjut Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) tetap menjadi agenda perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Badan Penghubung Daerah telah mampu menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, promosi, dan pelayanan penghubung secara efektif, dengan tingkat capaian indikator yang sebagian besar berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Ke depan, komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi PAD melalui pemanfaatan Wisma NTB, penguatan sinergi pusat–daerah, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang lebih terintegrasi akan terus menjadi prioritas. LKjIP ini diharapkan menjadi instrumen refleksi dan penguatan manajemen kinerja, sehingga Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dapat semakin adaptif, profesional, dan berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029.

Mataram, 2026

Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Ulu Achmad Sukarman, S.STP., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790515 199912 1 001